

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:



SAFITRI
NIM: 11675202720



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SAFITRI
 NIM : 11675202720
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
 DESA DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN
 XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
 TAHUN 2019.

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MAHMUZAR, M.Hum
NIK. 19760426 200701 1 016

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAFITRI
 NIM : 11675202720
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019.
 HARI/TANGGAL : SELASA, 21 JULI 2020.

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr.KAMARUDDIN, S.Sos.Ms.i
 NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I

Dr. ALMASRI, M.Si
 NIP. 19670801 200501 1 007

PENGUJI II

Dr.RODI WAHYUDI S.Sos, M.Soc.Sc
 NIK.130 717 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**

OLEH :

SAFITRI
NIM.11675202720

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dalam penelitian ini menetapkan indikator berupa peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 32 Tahun 2017 Dengan indikatornya yakni, Umum, tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara dan tahap penetapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan dan melukiskan secara terperinci dan mendalam, mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi data kualitatif, kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Panitia pelaksana sudah menerapkan proses pemilihan umum, tahap pencalonan hingga tahap penetapan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dilatar belakangi oleh faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan dan faktor pekerjaan dan penghasilan.

Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, nasehat, masukan, arahan dan hal lainnya dari berbagai pihak. Terutama kepada orang tua yakni: ayahanda Abu bakar dan ibunda Sarlis yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga.

Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti ucapkan kepada:

1. Prof.Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.A.g., Rektor UIN Suska Riau. Dr. H.Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor I Drs. H. Promadi, MA., Ph. D. Selaku wakil rektor III beserta staff dan karyawan Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh . Said HM, M. MA.g, MM selaku dekan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial semoga faklta Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Semoga Administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN SUSKA RIAU.
4. Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan saran, masukan yang sangat berarti bagi peneliti.
5. Bapak/ibu Dosen Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu bimbingan dan motivasi bagi peneliti selama di bangku perkuliahan.
6. Kepala Desa Pulau Gadang Syofian,SH,MH (Dit. majo sati) yang telah memberi izin dan membantu peneliti ketika penelitian di Desa Pulau Gadang.
7. Pemuda Desa Pulau Gadang kakanda Supriadi, ST, Joni saputra, Lukman hakim yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
8. Sahabat- sahabat KKN Desa Pulau Gadang sahabat jannah aku Anacusba Kurnia Fitriani, Dewi Safitri, Rena Daryani, Meri Safitri dan Ratna Sari yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus buat keluarga tercinta dan ke empat saudara abang dan kakak yang selalu ada yaitu Rauzi, Reno, Rosidi dan Siis Karmila. Serta semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah selalu meridhoi semua langkah peneliti peneliti berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah swt. Aamiin..

Peneliti telah berupaya memaksimalkan mungkin menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga bermanfaat bagi semua pihak membaca *amiin yarobbal alamin*.

Pekanbaru 04 maret 2020

SAFITRI

Nim.11675202720

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTARGAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 11
2.1 Demokrasi	11
2.2 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Indonesia	17
2.3 Partisipasi Masyarakat.....	26
2.4 Memilih Pemimpin Menurut Islam	31
2.5 Kerangka Berfikir.....	34
2.6 Penelitian Terdahulu	36
2.7 Konsep Operasional	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lokasi Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
3.4 Subyek Penelitian / Informan Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.2 Profil Desa Pulau Gadang	44
4.3 Geografis dan Demografi.....	47
4.4 Keadaan Sosial	50
4.5 Struktur Organisasi Desa.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Umum.....	55
5.2 Tahapan Persiapan	57
5.3 Tahapan Pencalonan.....	61
5.4 Tahapan Pemungutan Suara	67
5.5 Tahapan Penetapan.....	70
5.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .	74
BAB VI PENUTUP.....	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama calon Kepala Desa Pulau Gadang Tahun 2019	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Pulau Gadang.....	5
Tabel 1.3 Nama-nama Panitia Pelaksana Pemilihan.....	7
Tabel 2.1 Tabel Kerangka Berfikir	35
Tabel 2.2 Indikator Penelitian.....	39
Tabel 3.1 Key Informen	43
Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Pulau Gadang	46
Tabel 4.2 Jumlah kepala keluarga	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	50
Tabel 4.4 Nama Kepala Dusun	53
Tabel 5.1 Hasil Penghitungan Suara Antar Dusun.....	71

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pulau Gadang	54
Gambar 5.2 Pemberitahuan Dan Penyampaian Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	57
Gambar 5.3 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	61
Gambar 5.4 Pelaksanaan Penghitungan Suara	58
Gambar 5.5 Pelantikan Kepala Desa.....	70
Gambar 1.2 <i>Pie Chart</i> Rekapitulasih Hasil Penghitungan Suara.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan komisial, sebagai gagasan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta prilakunya. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Salah satu tonggak yang paling penting dalam demokrasi ialah melalui pemilu baik pemilihan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi. Rakyat merupakan aktor politik yang menentukan berhasil atau tidaknya hasil pemilihan umum tersebut. Salah satu ciri-ciri demokrasi adalah menyelenggarakan pemilihan umum atau pesta rakyat sehingga perwakilan atau pemimpin yang dipilih menjalankan roda pemerintahan. Ruang lingkup demokrasi terkecil diantara pemilihan kepala pemerintahan ialah pemilihan kepala desa. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan peristiwa politik ditingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung.

Keberadaan otonomi daerah diharapkan terjadi penguatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas demokrasi. Pemerintah daerah sebagai pemegang wewenang yang besar dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 akan menjadi titik pusat seluruh pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Wajah otonomi daerah akan tampak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam kebijakan otonomi desa, sebagai kemampuan masyarakat desa untuk mengatur dan melaksanakan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal/usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Haw widjaja (2008) desa dalam pandangan politik adalah masyarakat demokrasi sebuah masyarakat yang berdasarkan diri pada kedaulatan Rakyat. Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami demokrasi ditingkat lokal seperti pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ada di daerah riau ditingkat kabupaten ialah kabupaten kampar yang dilaksanakan secara serentak bergelombang. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di kabupaten kampar. Pemerintah desa merupakan pemerintah terendah yang berada dibawah pemerintah kabupaten, sehingga mutlak untuk dilaksanakan otonomi desa secara berkelanjutan untuk tercapainya rasa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kampar adalah desa pulau gadang dimana desa ini terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Pasal 2 Ayat (3) Tentang pemilihan kepala desa melalui tahapan- tahapan, pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pencalonan, ketiga tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan keempat tahapan penetapan.

Pemimpin merupakan hasil Pilihan dari masyarakat berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Karena pentingnya pemimpin, maka desa pulau gadang melakukan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 11 dijelaskan Tentang persyaratan calon kepala desa. berdasarkan data nama calon kepala desa pulau gadang yang telah memenuhi persyaratan berjumlah tiga orang.

Tabel 1.1

Nama calon Kepala Desa Pulau Gadang Tahun 2019

No	Periode	Nama calon kepala desa	Pendidikan
1	2019-2025	Syofian,SH.MH (Dt majo Sati)	S2
2	2019-2025	Akhir Yani,SE	S1
3	2019-2025	Abdul Razak (Dt Majo Kampau)	SLTA

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2019

Tabel 1.1 merupakan nama-nama calon kepala desa pulau gadang tahun 2019 yaitu nomor urut satu Syofian, SH.MH (Dt majo sati), nomor urut kedua Akhir Yani,SE dan nomor urut ketiga Abdul Razak (Dt Majo Kampau). Pada dasarnya setiap rakyat indonesia berhak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Pemilihan melibatkan seluruh masyarakat yang berhak memilih dalam menentukan Pilihan adalah hal yang terbaik dan harus terjadi, namun pelaksanaanya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput (golongan Putih), kalau hal ini terjadi atas kehendak sendiri atau karena memang itu yang menjadi Pilihan,artinya masyarakat tersebut sudah mempunyai pilihan, tentunya mereka juga mempunyai alasan mengapa mereka memilih golput (golongan putih).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Pulau Gadang

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Persentase
1	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih	1256 Orang	91 %
2	Jumlah pemilih laki-laki	740 Orang	53 %
3	Jumlah pemilih perempuan	634 Orang	46%
4	Jumlah penduduk yang tidak menggunakan hak pilih	174 Orang	12 %
5	Jumlah penduduk yang memilih golput (golongan putih)	7 Orang	0,5 %
5	Jumlah penduduk yang terdata sebagai pemilih	1374 Orang	100 %

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2019

Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk desa pulau gadang yang terdata sebagai pemilih, penduduk yang menggunakan hak pilih berjumlah 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) orang dengan persentase 91% dan jumlah pemilih laki-laki 740 (tujuh ratus empat puluh) orang dengan persentase 53% selanjutnya jumlah pemilih perempuan 634 (enam ratus tiga puluh empat) orang dengan persentase 46%. Jumlah penduduk yang tidak menggunakan hak pilih 174 (seratus tujuh puluh empat) orang dengan persentase 12%. Jumlah penduduk yang terdata sebagai pemilih berjumlah 1374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) orang dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tinginya partisipasi masyarakat dari tahun sebelumnya, namun faktor apa yang menjadi latar belakang masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa pulau gadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, karena demokrasi kita pada hari ini adalah *money politic* (politik uang) dan *black Compaingn* yang membuat manusia diam tanpa berbicara dan mencederai demokrasi bahkan dari terkecil sekalipun yaitu pemilihan di tingkat desa. Jika calon kandidat melakukan sebuah *money politic* maka ketentuan yang harus diterima yaitu diskualifikasi sebagai calon kandidat namun faktanya yang terjadi dilapangan beberapa calon melakukan sogokan atau pemberian amplop namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh panitia penyelenggara dan menurut Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan kepala desa langsung, umum, bebas jujur dan adil. Bentuk dari *black compaign* ini biasanya berupa selebaran gelap (*viegend bland*) jika dalam wujud tertulis. Semakin pentingnya kedudukan politik kepala desa baik dalam artian administrative maupun politik kekuasaan, jabatan desa dapat menjadi ukuran naik turunnya status sosial. Pejabat desa mempunyai kekuasaan atau sumber- sumber ekonomi desa, mempunyai pengaruh dalam menyalurkan pelayanan sosial dan pembangunan. kekuasaan untuk menentukan fasilitas sederhana cukup menjadi alasan adanya persaingan dalam pemilihan aparat desa. Demokrasi memiliki dua sisi yang sangat baik, namun disisi lain juga dapat menjadi sangat kejam. Konsep demokrasi sangat bebas, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan hal yang berkaitan dengan kejahatan. Oleh karena itu yang diperlukan pada demokrasi saat ini adalah bagaimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep demokrasi yang ada pada saat ini. Menurut Slamet (1994: 97,137) ada beberapa faktor lain dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat faktor internal yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan dan pekerjaan.

Agar terselenggaranya pemilihan kepala desa yang bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan kepala desa di desa pulau gadang tentunya ini menjadi tugas dari panitia pemilihan kepala desa yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilihan kepala desa di desa pulau gadang.

Tabel 1.3

Nama-nama panitia pelaksana pemilihan.

No	Nama	Jabatan
1	Ali Basya,S.Pd	Ketua
2	Alwira	Sekretaris
3	Erwin	Anggota
4	Yuwarlis	Anggota
5	Muhammad Nasir,SH	Anggota

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2019

Tabel 1.3 Merupakan nama panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh pemerintah desa pulau gadang. Ketua panitia Ali Basya,S.Pd sekretaris Alwira dan anggota Erwin, Yuwarlis dan Muhammad Nasir,SH. Panitia merupakan penyelenggara pemilihan kepala desa sehingga panitia menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. Namun masih ada masyarakat yang tidak memilih menggunakan hak suaranya untuk calon kepala desa dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih golongan putih (golput) Maka dengan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah : **Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019.**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengamati dan mempelajari fenomena dalam pelaksanaan pemilihan kepala di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019 maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi hak Pilih masyarakat terhadap pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penilitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemilihan kepala desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak pilih masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai Berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019 diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan untuk membantu bagi Penelitian selanjutnya dan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Tahun 2019 yang dilakukan di Desa Pulau Gadang dapat dijadikan pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca dan penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulis akan memberikan gambaran secara umum dan penulisan Skripsi ini maka penulis akan membagi kedalam VI BAB dimana masing-masing BAB terdiri dari sub-sub yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB Ini, menguraikan tentang latar belakang masalah penulisan. Tujuan penelitian manfaat penelitian, suatu sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB ini penulis akan mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian kerangka berfikir elevensi konsep-konsep operasional dan penelitian terpadu.

BAB III METODELOGI PENULISAN

Pada BAB ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian jenis dan sumber data metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang objek yang akan di teliti.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini menguraikan hasil Penelitian dan pembahasan yang akan di teliti.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB ini tentang kesimpulan dan penelitian dan sasaran agar dapat membangun bagi objek peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih disinilah yang disebut dengan demokrasi seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln Pada Tahun (1863), yaitu *government of the people, by the people for the people* atau dalam istilah lainnya seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter, *the will of the people* yang artinya sebagai “kehendak rakyat. Hubungan antara pemerintahan (state) dengan warga negara (society) selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan state and society ini dapat digambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Dalam berbagai literatur banyak diberikan rumusan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa dari suatu negara. Berdasarkan pada tiga ciri-ciri tersebut, maka suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses dan tujuan dari demokrasi.

Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama atas dasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah “kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Bahkan dalam sistem partisipasi masyarakat, sehingga menjadi “kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat”.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah perwakilan (representative government). Menurut Robert Dahl, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi. Pemilihan umum ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Fungsi legitimasi dalam pemilihan umum menjadi kebutuhan dalam sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah yang berdasarkan hukum yang disepakati bersama tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

2.1.1 Negara Hukum Yang Demokratis.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik tidak dapat dilepaskan dari studi hukum, sebab antara keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan repressif. Bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan tentang demokrasi harus dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum sehingga setiap konflik dalam berdemokrasi harus mempunyai rujukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga-lembaga negara yang akan dibentuk di dalam sistem yang demokratis haruslah dituangkan di dalam konstitusi yang pada dasarnya merupakan norma dasar atau hukum yang tertinggi di dalam suatu sistem pemerintahan. Aturan hukum yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan disebut dengan kontrak sosial antara seluruh rakyat. Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara hukum. Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang bersifat non demokratis (totaliter).

Hukum tertinggi di sebuah negara adalah produk hukum yang paling mencerminkan kesepakatan dari seluruh rakyat, yaitu konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan adalah konstitusi. Semua aturan hukum lain yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tersebut adalah produk “Mayoritas Rakyat”, sedangkan konstitusi adalah produk “Seluruh Rakyat”. Dengan demikian, dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatukan Pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.

2.1.2 Demokrasi di Indonesia

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti terumuskan di dalam Pancasila (termasuk prinsip kerakyatan atau demokrasinya) telah lama dipraktikkan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Mahfud mengutip pendapat Mattulada bahwa dalam kehidupan masyarakat nusantara dikenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang disebut “Kaum” atau Anang (Bugis) atau Marga (Batak) yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat. Secara perorangan warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya. Tiap-tiap warga kaum dianggap mempunyai hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak mempunyai kelebihan hak atas warga lainnya.

Kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan dalam persekutuan kaum pada masyarakat nusantara. Dalam masyarakat kaum ini tidak terdapat tingkatan-tingkatan yang berdasarkan asal keturunan yang membedakan seseorang dari orang lain, dan ini menjadi corak kerakyatan dalam kehidupan masyarakat kaum zaman purba nusantara. Hal tersebut menandakan bahwa pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat purba nusantara sudah di kenal adanya sistem hidup berkelompok yang demokratis. Konstitusi Indonesia, undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hirarki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan melalui pemerintahan. Pada era presidensial Sukarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin pada tahun (1956), Indonesia juga sempat menggunakan demokrasi pancasila pada era Presiden Suharto. Sejak merdeka sebagai sebuah negara bangsa, bangsa Indonesia senantiasa berada dalam langkah-langkah tanpa henti berjuang membangun demokrasi.

Pada periode pertama begitu bangsa ini meraih kemerdekaannya, demokrasi dicoba diimplementasikan dalam format demokrasi parlementer yang berlangsung kurang lebih 13 (tiga belas) tahun. Robert Dahl menegaskan bahwa demokrasi melibatkan dua variabel, yaitu konstestasi dan partisipasi yang sangat menentukan bagi proses perkembangan demokrasi. Dalam implementasi demokrasi prosedural-elektoral yang mengagendakan penyelenggaraan pemilu secara reguler, partisipasi rakyat merupakan faktor dan indikator dominan bagi keberhasilan demokrasi. Dalam konteks ini, Peters menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan partisipatif (participatory state), partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang luas bagi warga negara dapat tumbuh subur, apabila dalam proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan penekanan pada negoisasi ketimbang menggunakan hierarki.

Oleh karena itu, partisipasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas demokrasi. Pemilu merupakan salah satu alat dalam sistem demokrasi untuk menentukan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan kehendak rakyat. Jika dalam demokrasi diakui bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, maka pemilu merupakan media yang sangat penting untuk menegaskan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian sistem pemilu harus menjamin secara konkret aspirasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

2.2 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

Konstitusi negara republik Indonesia sudah menyebutkan tentang kekuasaan dan keberadaan desa sebagai bagian yang penting dalam negara. Undang– undang dasar negara indonesia tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara republik indonesia. Pengertian desa secara politik adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan, yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian secara politik ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Keberadaan desa dalam konteks politik, sebagai bagian dari masyarakat hukum desa mempunyai hak untuk mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya itu sudah dimiliki sejak kesatuan masyarakat hukum itu ada tanpa diberikan oleh siapapun. Sehingga dari sinilah mengapa desa disebut sebagai otonomi asli. Jika dilihat dari konsep demokrasi dan penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki oleh desa dalam bidang politik tersebut, maka salah satu wujud kehendak rakyat sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keterlibatannya dalam pemilu. Jika dilihat dari bentuk pemilihan yang paling kecil adalah pemilihan kepala desa, Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, baginya demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Secara historis pemilihan kepala desa telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang- undang ini menjelaskan bahwa pemerintahan daerah terkait permasalahan pemilihan kepala desa, diatur dalam Pasal 95 tentang desa, sebagai berikut:

- a) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
- b) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- c) Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan desa dan disahkan oleh Bupati.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang menjadi unsur penting dalam pemerintahan desa adalah kepala desa dan juga perangkat desa. Dalam rangka untuk memilih atau menentukan siapa yang akan menjadi kepala desa, maka proses yang akan dilakukan adalah dengan dipilih langsung oleh penduduk desa tersebut. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi sebagai kepala desa, akan ditentukan dengan suara terbanyak yang diperoleh saat proses pemilihan tersebut, dan selanjutnya ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) kemudian dilantik oleh bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, masa jabatan untuk seorang kepala desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan, namun pemerintah daerah bisa menetapkan peraturan tentang masa jabatan sesuai dengan kondisi budaya daerah setempat.

2.2.2 Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanan reformasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diselimuti oleh semangat reformasi yang sangat menggebu-gebu dalam segala aspek kehidupan bernegara, bahkan berlangsung dengan cepat. Sehingga dalam perjalanan reformasi yang begitu cepat tersebut dirasakan bahwa Undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah ini belum mampu sepenuhnya untuk mencapai apa yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan jiwa dan semangat berdemokrasi dalam negara kesatuan republik indonesia. Akhirnya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terkait dalam hal pemilihan kepala desa ditentukan mengenai pemilihan kepala desa yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara republik indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihannya diatur dengan peraturan daerah (Perda) yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

- b) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai kepala desa.
- c) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda) dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Selanjutnya, masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-undang ini adalah selama 6 (enam) tahun, dan bisa dipilih dalam satu kali masa jabatan berikutnya. Proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa secara rahasia, jujur dan adil. Selain itu, semua tahapan dalam pemilihan kepala desa merupakan tanggung jawab panitia pemilihan di desa mulai dari pembentukan panitia pemilihan itu sendiri, hingga penetapan kepala desa terpilih. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan yang diinginkan diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tercipta sistem penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.
- b. Meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih baik.
- c. Mendorong pemberdayaan aparatur pemerintahan dalam pembangunan.
- d. Mendorong kreatifitas daerah dalam mengembangkan potensi dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- e. Mendorong terciptanya instusi yang lebih baik, inovasi dan fleksibel.
- f. Meningkatkan moral dan komitmen pada produktifitas yang tinggi.

2.2.3 Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, cukup memberikan kekuatan akan adanya otonomi desa dan kemandirian desa dalam menentukan masa depan desa itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini terdapat sebanyak 18 BAB dan 122 Pasal, yang secara keseluruhan membahas tentang desa, wewenang desa, tanggung jawab desa, pemerintahan desa, pemilihan kepala desa dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan pemilihan kepala desa, terdapat dalam Pasal 31 dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 31 diatas menjelaskan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Selanjutnya, proses pemilihan kepala desa dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Pasal 32 Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka dibentuklah panitia pemilihan, dimana anggota panitia pemilihan tersebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat. Salah satu tugas panitia pemilihan kepala desa adalah mensosialisasikan pemilihan kepala desa kepada masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaring bakal calon, melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pengaturan tentang pemilihan kepala desa serentak juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diawali dengan pembentukan panitia pemilihan di kabupaten yang dibentuk oleh bupati, tugas dari panitia pemilihan di kabupaten ini adalah untuk mengkoordinir, sosialisasi, mengawasi, mempersiapkan perlengkapan pemilihan yang akan dilaksanakan oleh setiap desa melalui panitia pemilihan di tingkat desa.

2.2.4 Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 32 Tahun 2017.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka dibentuk peraturan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di seluruh wilayah kabupaten kampar. Kemudian, berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Tentang pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang. Dalam Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah.
- 2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak dua kali dalam jangka waktu empat tahun terhitung mulai dari tahun 2017.
- 3) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Tahapan persiapan.
 - b. Tahapan pencalonan.
 - c. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - d. Tahapan penetapan.
- 4) Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan azas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dengan keputusan bupati.

Kepala desa dipilih secara langsung penduduk desa warga negara republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian panitia pemilihan kepala desa dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa panitia penyelenggaraan pemilihan kepala desa merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat. Memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menetapkan panitia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan suara (PPS) melalui surat keputusan. Panitia menerima pendaftaran bakal calon kepala desa. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kepala desa yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga/ perangkat daerah dan instansi terkait. Kemudian panitia menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon kepala desa yang telah lulus dalam penyaringan dan selanjutnya menjadi calon kepala desa yang berhak untuk dipilih. Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih sesuai keputusan panitia pemilihan kepala desa. Melakukan pengundian nomor bagi calon kepala desa yang berhak dipilih dan menetapkan tata tertib kampanye. Panitia menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara. Apabila terjadi sengketa dalam pemilihan maka panitia menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya. Panitia menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Participation" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis "Partisipasi" adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikuti sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin. Menurut Meriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin. Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dalam menjalankan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke daerah.

2.3.1 Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public polity*). Norman H.Nie dan Sidney mengemukakan bahwa partisipasi politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi kepada pemilihan kepala daerah dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari perilaku politik. Partisipasi politik menurut Hungtingto dan Joan Nelson adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Ransisky dan Tyler menguraikan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang mempengaruhi keputusan politik. Orang yang paling tahu tentang suatu keinginan politik ialah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu partisipasi politik individu didalam agregasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.

2.3.2 Faktor –Faktor Dalam Partisipasi

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dalam pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (dalam Ainur Rohman 2009 : 49 yaitu :

Pertama Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau kemauan sendiri atau antusias tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan mereka tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir.

Kedua masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Menurut Tjokromidjojo (1995:226) mengatakan ada (3) tiga elemen yang menjadi perhatian dalam partisipasi yaitu *pertama* kepemimpinan, suatu bangsa adalah sangat menentukan. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk sebuah pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi. *Kedua* komunikasi, gagasan-gagasan kebijakan dan rencana hanya akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti. Hal – hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul dapat dipetik atau diterima oleh masyarakat.

Ketiga pendidikan, tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran tinggi bagi warga negara, dengan memudahkan pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung pada ketersediannya kualitas pendidikan, baik formal maupun informal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu menurut Ibrahim Surotinojo ada beberapa faktor lain dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal

Dalam faktor internal hal yang mempengaruhi bersal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Menurut Slamet (1994: 97,137) faktor internal terdiri dari :

- a. Usia

Faktor usia merupakan yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

- b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatkan bahwa pada dasarnya tempat perempuan, peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut

2.4 Memilih Pemimpin Menurut Islam

Seorang pemimpin adalah faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun negara. Jika pemimpin itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korupsi, serta mendzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Oleh karena itulah islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik. Dalam Al Qur'an, Allah SWT memerintahkan ummat islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman. Ada beberapa sifat baik yang harus dimiliki oleh para Nabi, yaitu: Amanah (dapat dipercaya), Siddiq (benar), Fathonah (cerdas/bijaksana), serta tabligh (berkomunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik dengan rakyatnya). Sifat di atas juga harus dimiliki oleh pemimpin yang kita pilih. Pilih pemimpin yang amanah, sehingga dia benar-benar berusaha mensejahterakan rakyatnya. Bukan hanya bisa menjual aset negara atau kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pilih Pemimpin yang cerdas, sehingga dia tidak bisa ditipu oleh anak buahnya atau kelompok lain sehingga merugikan negara. Pemimpin yang cerdas punya visi dan misi yang jelas untuk memajukan rakyatnya.

Allah swt berfirman dalam surah Annisa Ayat (59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Ayat (59) ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Taat dan patuh kepada perintah Allah SWT dengan mengamalkan isi kitab suci al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah SWT itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
- 2) Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi al-Qur'an.
- 3) Patuh kepada pemimpin disini ialah kepala desa ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri (Pemimpin) adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa.

Allah berfirman dalam surah Annisa Ayat (58) tentang tanggung jawab pemimpin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat yaitu seorang Pemimpin yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka agar selalu amanah kepada masyarakat. Pengertian amanat adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah SWT kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah SWT terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain ; melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya

2.5 Kerangka Berfikir.

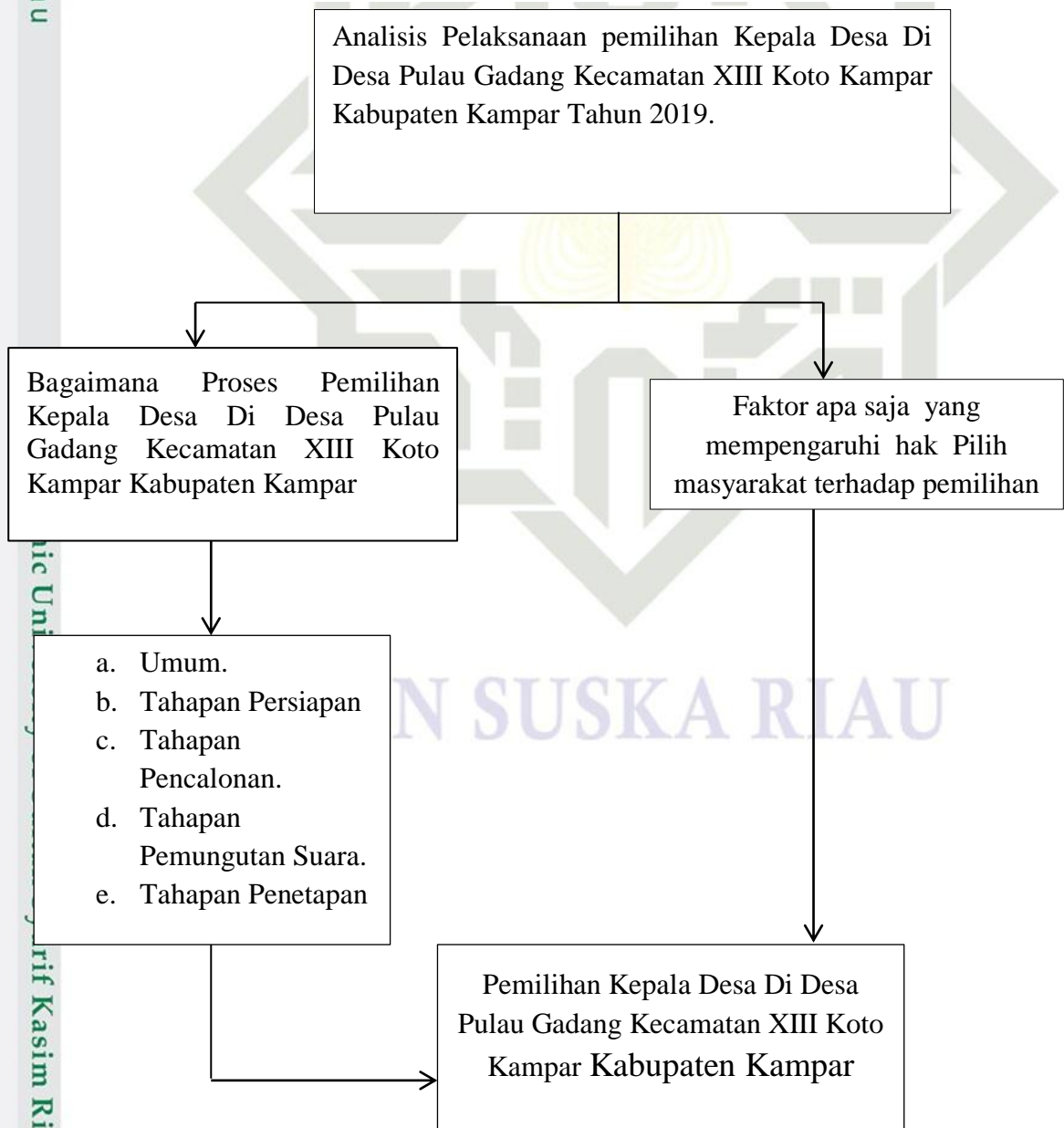
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi pemerintahan daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dilandasi semangat otonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah akan semakin memberikan peluang besar bagi terciptanya kehidupan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Melalui Undang-undang tersebut, desa diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat yang memiliki kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik berlandaskan sistem desa otonom yang disebut desa.

Tabel 2.1**Tabel kerangka berfikir**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adanya Penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berperan penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan karena dengan adanya penelitian sebelumnya maka penulis saat ini dapat terbantu dalam penulisan penelitian yang akan dihadapi yang mendasari penelitian ini.

Penelitian oleh Rido Rikardo (2015) Pemilihan kepala Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Datar Kabupaten Kuantan Singingi menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan menggunakan indikator Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan diikuti oleh Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2015 Tentang tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Berdasarkan pengamatan penulis, panitia telah membebankan sebagian biaya kepada masing-masing calon kepala desa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) tentunya ini bersebrangan dengan Peraturan Bupati tersebut yang tidak menyebutkan bahwa calon kepala desa wajib menanggung biaya pelaksanaan kepala desa tersebut. Batasan masalahnya, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis memfokuskan pada penjangkaran calon dan pemungutan suara di pemilihan kepala desa didesa sikijang. Dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa sikijang, minimnya anggaran dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa. Minimnya pengawasan panitia pelaksanaan pemilihan pada malam sebelum pemilihan dan pada hari pemungutan suara banyak sekali pelanggaran dalam hal ini adalah politik uang (money politic) atau dengan kata lain serangan pajar.

Penelitian oleh Dede Ahmad (2014) Analisis implementasi Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa. Dengan menggunakan indikator peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemilihan kepala desa di desa Batu Sasak belum maksimal. Selain masih sedikitnya jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan kepala desa, pendidikan yang diikuti oleh calon kepala desa didesa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih belum maksimal. Selain masih sedikitnya jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan kepala desa, pendidikan yang diikuti oleh calon kepala desa didomisili oleh tamatan SLTP. Rata-rata tanggapan responden menyatakan tanggapan cukup baik, alasan diberikan karena saat pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang berjalan cukup lancar dan dilakukan secara demokratis. Dalam melaksanakan pencalonan dan pemilihan kepala desa masih terdapat kendala dan hambatan. Kurangnya pengalaman pihak panitia, kurangnya dilakukan penyeleksian calon kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Pepi Deko (2016) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan kepala Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan menggunakan indikator, Faktor adanya perangsang, faktor karakteristik seseorang, dan faktor karakteristik sosial dan situasi lingkungan itu sendiri mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa munsalo kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat sudah meningkat, karena faktor situasi dan dan lingkungan itu sendiri mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut, terlihat dari tempat sasaran objek yang akan diteliti dan juga beberapa perbedaan lainnya berupa: Judul penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian dan sasaran penelitian. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2019.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel (masri siangrimbun) 1989:46)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Berdasarkan pedoman umum tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka peneliti menggunakan indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019	a.Umum	a. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak. b. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan.
	b. Tahapan Persiapan.	a. Pemberitahuan dan penyampaian laporan akhir masa jabatan kepala desa. b. Penyelenggaraa n pemilihan kepala desa. c. Tugas dan kewajiban panitia pemilihan.
	c. Tahapan Pencalonan	a. Persyaratan bakal calon kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		b. Pengumuman dan bakal calon. c. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon. d. Penetapan pemilih. e. Saksi. f. Kampanye. g. Masa tenang.
	h. Tahapan Pemungutan Suara	a. Pelaksanaan penhitungan suara.
	i. Tahapan Penetapan	a. Pelantikan kepala desa

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 32 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tentang analisis pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria permasalahan penelitian, Selain itu penulis menemukan kejanggalan antara peraturan dan pelaksanaannya di lapangan.

3.2 Jenis dan Sumber Data.

Jenis penelitian adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata.

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa:

3.2.1 Data Primer

Merupakan pokok data dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari responden. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama, atau hasilnya dengan kata lain diperoleh data melalui kegiatan menulis secara langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkaitan dengan masalah yang diteliti di lapangan (Suryabrata,2003:39). Untuk mendapatkan data priemer, peneliti mengumpulkan datanya langsung di desa pulau gadang dan mendapatkan data-data pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, data tersebut berfungsi untuk mempermudah penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku penunjang dokumen, hasil-hasil penelitian atau informasi dari instansi tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dijawab langsung oleh narasumber atau orang yang diwawancarai.

3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, vidio atau karya-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dari studi kepustakaan dalam penelitian ini.

3.4 Subyek Penelitian / Informan Penelitian

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi subyek penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subyek penelitian atau digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Selanjutnya penentuan subyek penelitian atau responden dianggap sebagai Key informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulau Gadang.

Tabel 3.1 key Informen

No	Jabatan	Jumlah
1	Calon kepala desa	3 Orang
2	Panitia pelaksana pemilihan	2 Orang
3	Masyarakat dan tim sukses	7 Orang
4	Pemuda/mahasiswa	3 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti dari masyarakat Desa Pulau Gadang, 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Profil Desa Pulau Gadang****4.1.1 Sejarah Desa Pulau Gadang**

Desa Pulau Gadang adalah salah satu desa dari tiga belas nama desa yang terdapat di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Menurut beberapa tokoh masyarakat, nama desa pulau gadang berasal dari adanya sekumpulan jenis tumbuhan pepohonan besar yang banyak terdapat di pinggiran sungai kampar di sebuah semenanjung tempat berlabuhnya masyarakat yang bernama pohon puo (bahasa daerahnya). Sehingga desa kampung tersebut dinamakanlah Puo Godang (Puo Besar), Namun seiring perkembangan zaman nama desa puo godang tersebut diubah menjadi desa pulau godang serta disempurnakan menjadi desa pulau gadang .

Pada tanggal 31 Agustus 1992 masyarakat desa pulau gadang dipindahkan karena adanya pembangunan PLTA koto panjang (Milik PLN), yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang berjumlah 592 KK pada saat itu. Demi kelangsungan hidup di lingkungan yang baru, masyarakat diharuskan menanam tumbuhan baru, merenovasi rumah serta menciptakan usaha-usaha melalui Program pemerintah transmigrasi yang saat itu dipimpin oleh Bapak M.Taher selaku kepala unit penan transmigrasi (KUPT) dari departement sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1999 terjadi pemekaran desa di desa pulau gadang, dimana saat itu desa pulau gadang dibagi menjadi 2 yaitu desa induk desa pulau gadang dan desa koto mesjid, namun secara wilayah hukum adat desa pulau gadang dan desa koto mesjid tetap memiliki satu kenagarian yaitu kenagarian pulau gadang yang dipimpin oleh seorang pimpinan adat/pucuk adat yang bergelar Dt. tandiko. Akibat dari pemekaran tersebut ,maka di lakukanlah penataan ulang seluruh wilayah dan struktur lembaga.

Berikut adalah nama-nama tokoh yang pernah ataupun masih memimpin desa sehingga jumlah KK (kepala keluarga) di desa pulau gadang menjadi 333 KK dengan kepala desa bapak Djamaris Arif. Selanjutnya setelah pemerintahan bapak Djamaris Arif, masa pemerintahan dilanjutkan oleh bapak Syofian,SH.MH sampai pada Tahun 2007 dilanjutkan oleh bapak Syofian Evendi sampai Tahun 2013 dan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Razak Dt. majo kampau selaku kepala desa pulau gadang periode 2013-2019 dan kemudian dilanjutkan oleh Syofian,SH,MH (Dt majo sati) sekarang.

UIN SUSKA RIAU

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Desa Pulau Gadang

No	Nama	Periode	Keterangan
1.	Ta'alir, Dt. Paduko Rajo	1930-1946	Almarhum...
2.	M. Saleh, Dt. Paduko Simarajo	1946-1947	Almarhum...
3.	Arifin Ja'far	1947-1948	Almarhum...
4.	Ali Bungsu, Dt. Mudo	1948-1949	Almarhum...
5.	M. Saleh	1949-1957	Almarhum...
6.	Syekh H. Jailani, E. Sutan	1957-1958	Almarhum...
7.	Alif, Dt. Tandiko	1958-1970	Almarhum...
8.	H. Zakaria	1970-1972	Almarhum...
9.	Imam Djarjani	1973-1974	Almarhum...
10.	Syamsul Bahar	1974-1986	
11.	M. Jusar, Dt. Tanjalelo	1986-1990	Almarhum...
12.	H. Alwi Djamaludin	1990-1998	Almarhum...
13.	Djamaris	1998-2000	Almarhum...
14.	Andi Suroso (Pjs)	2000-2001	
15.	Syofian,Sh,Mh Dt. Majo Sati	2001-2007	
16.	Muslimin (Plt)	2007	
17.	Syofian Evendi	2007-2013	
18.	Abdul Razak Dt. Majo Kampau	2013-2019	
19.	Syofian,SH,MH Dt. Majo Sati	Sekarang	

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2020

Tabel 4.1 merupakan nama-nama kepala desa pulau gadang dimulai dari masa pimpinan Ta'alir, Dt. Paduko Rajo (almarhum) periode 1930-1946, kemudian semasa M. Saleh, Dt. Paduko Simarajo (almarhum) periode 1946-1947,diteruskan oleh Arifin Ja'far (almarhum) periode 1947-1948, selanjutnya Ali Bungsu, Dt. Mudo (almarhum) periode 1948-1949, setelah itu jabatan kepala desa dipimpin oleh M. Saleh (almarhum) periode 1949-1957, diteruskan oleh Syekh H. Jailani, E. Sutan (almarhum) periode 1957-1958, setelah itu dilanjutkan oleh Alif, Dt. Tandiko (almarhum) periode 1958-1970, dan diteruskan oleh H. Zakaria (almarhum)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode 1970-1972, digantikan oleh Imam djarjani (almarhum) periode 1973-1974. Kemudian syamsul Bahar (almarhum) periode 1974-1986, dan diteruskan oleh M. Jusar, Dt. Tanjalelo (almarhum) Periode 1986-1990, selanjutnya H. Alwi Djamaludin (almarhum) periode 1990-1998, setelah itu dipimpin oleh Djamaris (almarhum) periode 1998-2000, dan digantikan oleh Andi Suroso (Pjs) periode 2000-2001 kemudian jabatan kepala desa dipimpin oleh Syofian,Sh,Mh Dt. Majo Sati periode 2001-2007 kemudian dilanjutkan oleh Muslimin (Plt) periode 2007 dan diteruskan oleh Syofian Evendi periode 2007-2013, selanjutnya Abdul Razak (Dt. Majo Kampau) periode 2013-2019 dan sekarang dipimpin oleh Syofian,SH,MH (Dt. Majo Sati).

4.6 Geografis dan Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Secara geografis desa pulau gadang yang memiliki luas $\pm 128,635 \text{ KM}^2$ dimana 60 % berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit yang dijadikan masyarakat sebagian besar untuk perkebunan karet, 30 % daratan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian serta 10% rawa yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perikanan (kolam ikan) khususnya ikan patin merupakan desa yang terletak dalam wilayah kecamatan XIII koto kampar kabupaten kampar dengan jarak ke ibu kota kecamatan 17 KM dan jarak ke ibu kota Kabupaten adalah 35 KM. Sama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa lainnya yang ada di Indonesia, desa pulau gadang juga mempunyai dua iklim yakni kemarau dan hujan yang berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian masyarakat desa pulau gadang. Adapun batas-batas desa pulau gadang secara administrasi desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa kabun Kecamatan Kabun.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa balung Kecamatan XIII Koto Kampar.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa lubuk agung/tanjung alai Kecamatan XIII Koto Kampar.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Dan Desa Silam Kecamatan Kuok.

4.2.2. Luas wilayah desa

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. Pemukiman | : 192Ha |
| b. Pertanian/perkebunan | : 162,5 Ha |
| c. Ladang/tegalan | : 161 Ha |
| d. Hutan | : 23.000 Ha |
| e. Rawa-rawa | : 16 Ha |
| f. Perkantoran | : 0,25 Ha |
| g. Sekolah | : 4,75 Ha |
| h. Jalan | : 6 Ha |
| i. Lapangan Sepak Bola | : 1,5 Ha |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 17 KM
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 35 KM

Tabel 4.2
Jumlah Kepala Keluarga

No	Jumlah kepala keluarga (KK)				Jumlah Total
	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	
1.	187	176	131	160	654

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2020

Tabel 4.2 merupakan jumlah kepala keluarga dusun 1 (satu) berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) kepala keluarga, dusun 2 (dua) berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) kepala keluarga, dusun 3 (tiga) berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) kepala Keluarga dan dusun 4 (empat) berjumlah 160 (seratus enam puluh) kepala keluarga . Jumlah keseluruhan 654 (enam ratus lima puluh empat) kepala keluarga.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

No	Jumlah penduduk								Jumlah Total		Jumlah Total
	Dusun I		Dusun II		Dusun III		Dusun IV				
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
9	374	360	355	347	230	251	340	317	1299	1275	2574

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2020

Tabel 4.3 menjelaskan Jumlah Penduduk, dusun satu laki-laki berjumlah 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) dan jumlah perempuan 360 (tiga ratus enam puluh empat) dusun dua laki-laki berjumlah 355 (tiga ratus limapuluh lima) jumlah perempuan berjumlah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) dusun tiga jumlah laki-laki berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) dan jumlah laki-laki berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu, dusun empat laki-laki berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) dan jumlah perempuan berjumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) dan total jumlah laki-laki 1299 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan orang dan jumlah perempuan secara keseluruhan 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) orang dan total secara keseluruhan 2574 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat).

4.7 Keadaan Sosial

4.3.1 lembaga pendidikan

a. Gedung TK/PAUD : 1

b. SD/MI : 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. SLTP/MTS	: 2
d. SLTA/MA	: 1
e. Lain-lain	: 4 (TPA)

4.3.2 Kesehatan

a. Jumlah bayi lahir	: 31 Orang\
b. Jumlah bayi meninggal	: 1 Orang
c. Jumlah ibu melahirkan	: 32 Orang
d. Jumlah ibu melahirkan meninggal	: 0
e. Cakupan imunisasi polio 3	: 105 Orang
f. Cakupan imunisasi DPT-1	:
g. Cakupan imunisasi Cacar	:

4.3.3 Gizi Balita

a. jumlah balita	: 245 Orang
b. Balita gizi buruk	: 0
c. Balita gizi baik	: 245 Orang
d. Balita gizi kurang	: 0

4.3.4 Pemenuhan air bersih

a. Pengguna Sumur Galian	: 8 KK
b. Pengguna air pah	: 15 kk
c. Pengguna sumur pomp	: 590 KK
d. Pengguna sumur hidran umum	: 0
e. Pengguna air sungai	: 21 KK

4.5.1 Pertanian

4.4.4 Keagamaan

a. Agama	
b. Islam	: 2574
c. Khatolik	: -
d. Kristen	: -
e. Hindu	: -
f. Budha	: -

Keadaan Ekonomi

a. Padi sawah	: - ha
b. Padi ladang	: - ha
c. Jagung	: - ha
d. Palawija	: 1 ha
e. Jeruk	: 3 ha
f. Kakao/Coklat	: 1 ha
g. Sawit	: 15 Ha
h. Karet	: 967 Ha
i. Kelapa	: - Ha
j. Kopi	: - Ha
k. Singkong	: 1 Ha
l. Lain-lain	: -Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1 Peternakan

- a. Ayam bras petelur : 2000 Ekor
- b. Kambing : 149 Ekor
- c. Itik : 25 Ekor

4.5.2 Perikanan

- a. Kolam Ikan : 42 Ha

Tabel 4.4

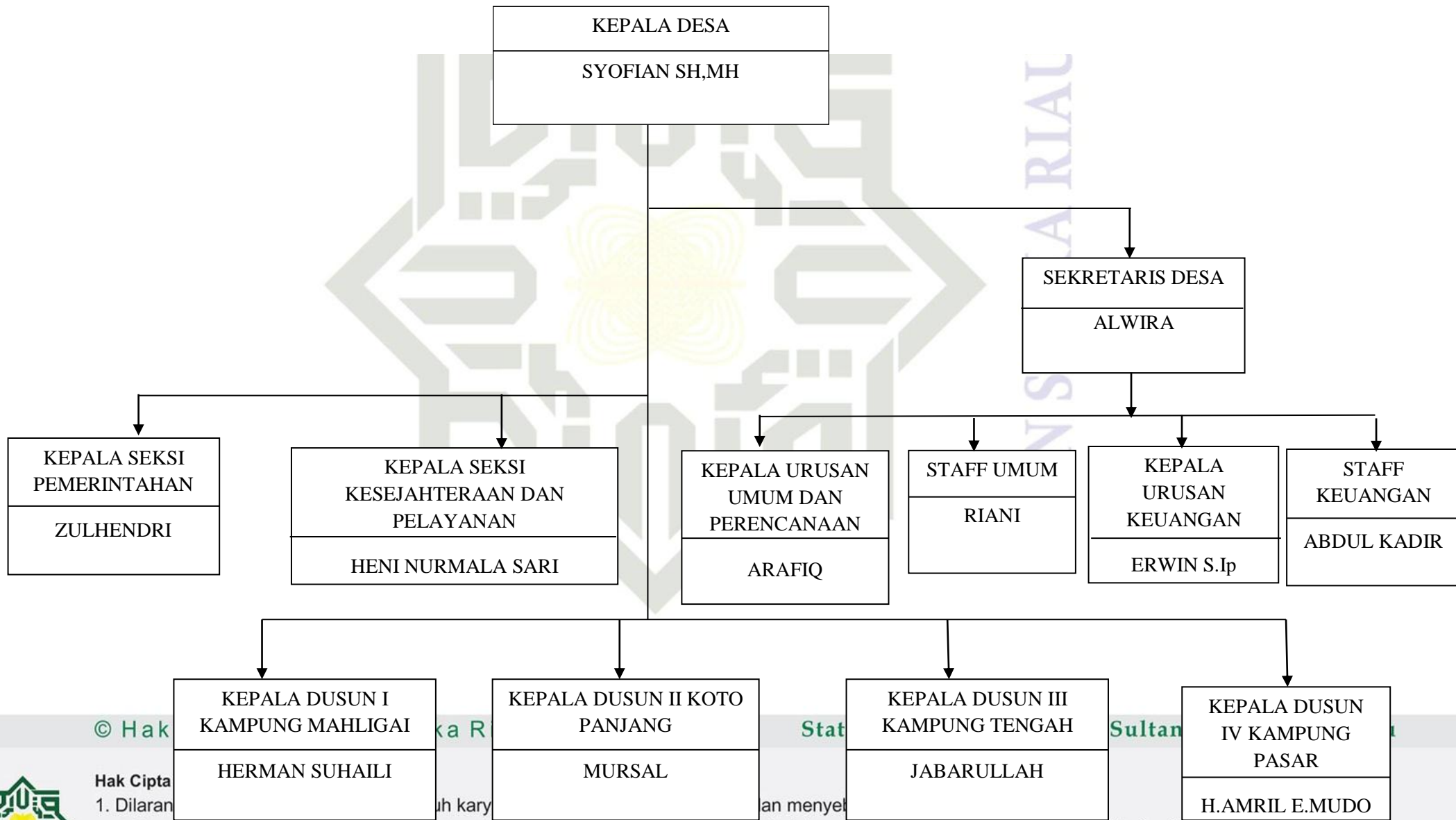
Nama kepala dusun

NO	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun I Kp. Mahligai	Herman Suhaili	2	4
2.	Dusun II Koto Panjang	Mursal	2	4
3.	Dusun III Kp. Tengah	Jabarullah	2	4
4.	Dusun IV Kp. Pasar	H. Amril	2	4

Sumber: Kantor Desa Pulau Gadang, 2020

Tabel 4.4 merupakan nama kepala dusun desa pulau gadang, dusun satu kampung mahligai nama kepala dusun, Herman Suhaili jumlah rukun warga (rw) dua jumlah rukun tetangga (rt) empat. Dusun duakoto panjang nama kepala dusun, Mursal jumlah rukun warga (rw) dua jumlah rukun tetangga (rt) empat. Dusun tiga kampung tengah nama kepala dusun, Jabarullah jumlah rukun warga (rw) dua jumlah rukun tetangga (rt) empat dan dusun empat kampung pasar nama kepala dusun, H. Amril jumlah rukun warga (rw) dua jumlah rukun tetangga (rt) empat.

STRUKTUR ORGANISASI DESA PULAU GADANG



© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan data-data penelitian yang dilakukan berhubungan dengan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, sudah memenuhi persyaratan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar di mulai dari tahap persiapan hingga tahap penetapan dan masyarakat yang mengikuti pemilihan kepala desa sudah menggunakan hak pilihnya berdasarkan prosedur pemilihan. Kepala desa adalah posisi yang sangat penting demi kemajuan desa sehingga masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih pemimpin dalam pemilihan kepala desa, karena masyarakat menginginkan adanya perubahan kearah yang lebih baik dan menjadikan desa pulau gadang sebagai desa yang maju dan masyarakatnya sejahtera. Bahwa berdasarkan tinjauan demokrasi yang dilaksanakan di desa pulau gadang tidak terdapat yang mencederai demokrasi seperti politik uang (money politic) dan masyarakat yang tidak dapat memilih karena faktor tuntutan kerja, dan pelajar atau mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menuntut ilmu diluar Kecamatan XIII Koto Kampar. Sehingga tidak dapat memilih sewaktu pemilihan kepala desa sedang berlangsung, adapun masyarakat yang memilih golput (golongan putih) adalah masyarakat yang memang tidak mengetahui arti pentingnya demokrasi.

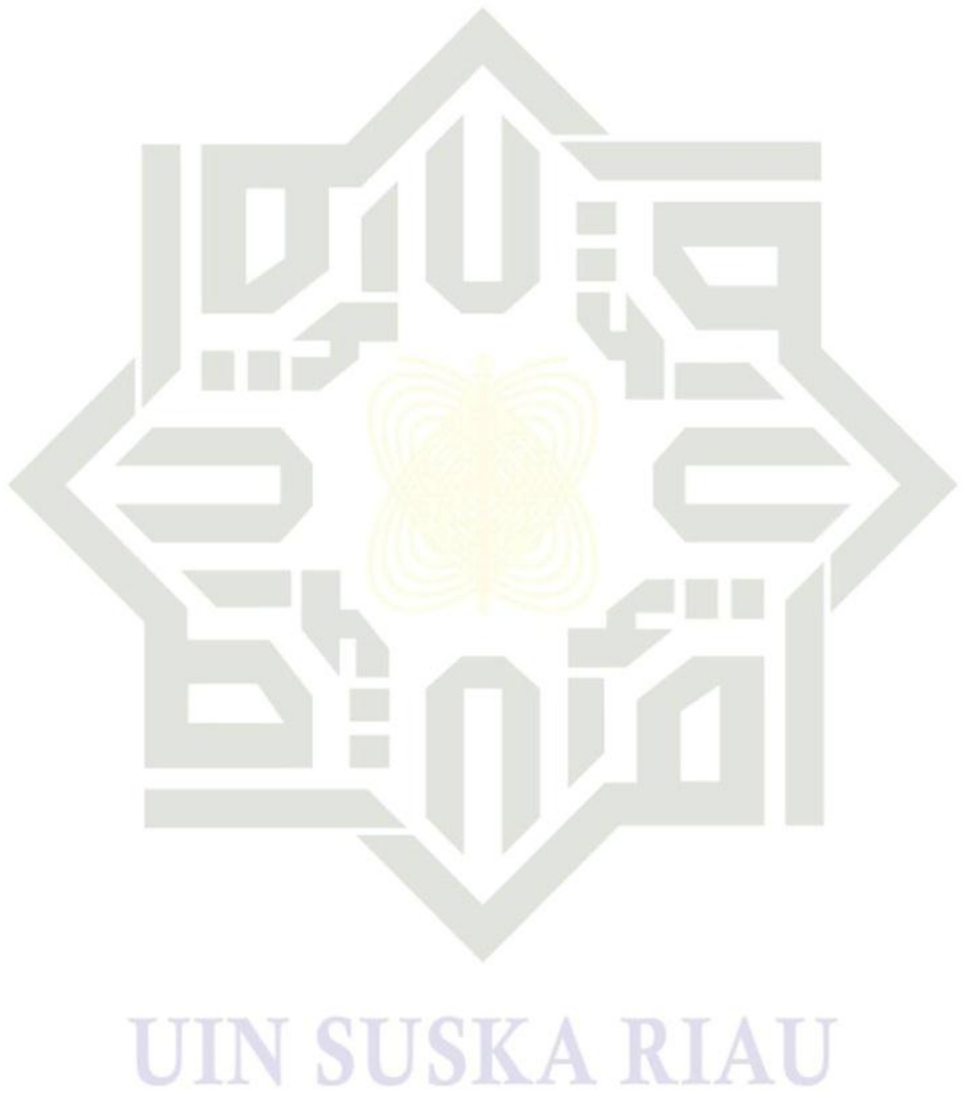
2. Hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Pulau Gadang adalah:
 - a. Adanya faktor usia.
 - b. Adanya faktor jenis kelamin.
 - c. Adanya faktor pendidikan
 - d. Adanya faktor pekerjaan dan penghasilan.

6.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

- a. Disarankan bagi masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar agar bersedia dan dapat meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa karena dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut maka masyarakat dapat memilih dan memilih calon kepala desa yang pantas dan dianggap mampu serta layak untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi di desa atau sebagai kepala desa.
- b. Disarankan kepada kepala desa yang terpilih agar menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya sesuai dengan aturan atau

perundang-undangan yang berlaku, sehingga cita-cita keinginan masyarakat desa dapat tercapai dan terpenuhi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kusnadi, *Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 2 No. 3 2015.
- Alia Harumdani Widjaja, *Implikasi Konstitusional Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa*, Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 2 Juni 2017.
- Almasri, Muammar Alkadafi, *Administrasi pemerintahan di Indonesia*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Faidil. A. 2014. *Abraham licoln Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Ircisod.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, Nikmatul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa (dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi)* Malang, Jawa Timur: Setara Pres.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hidayat, Ara, Machali, Imam, *pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Educa, 2010.
- Hutington, samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Renika Cipta.
- Juliantoro, Dadang, (ed). 2000. *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Kurniadi, Didin, Machali, Imam, *manajemen Pendidikan konsep dan prinsip pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Michael Rush dan Althoff. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rajawali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diilindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diilindungi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian dibidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Grup

Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang dikabupaten Kampar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

<http://wayanpolik.blogspot.com/2012/11/faktor-faktor-partisipasi.html>.

<http://turwahyudin.wordpress.com/2008/04/16/partisipasi-politik>

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

Panitia pelaksana pemilihan

1. Apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa, tahap-tahap apa saja yang harus dilalui oleh calon kepala desa, dan berapa lama untuk mengikuti tahap-tahap itu?
3. Menurut bapak, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa pulau gadang ini apakah sudah terlaksanakan secara tertib, aman dan damai ?
4. Apa tanggapan bapak, selama pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa pulau gadang di tahun 2019 apakah terdapat surat suara yang rusak ?
5. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa, apakah sudah dilakukan dengan baik oleh anggota panitia pemilihan kepala desa?
6. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa apakah ada kecurangan-kecurangan selama pelaksanaan pemilihan kepala desa?
7. Bagaimana pelaksanaan pembukaan kotak suara apakah selama pembukaan terjadi konflik atau ketegangan antara pendukung pasangan calon?

Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Dalam pemilihan kepala desa apa yang menjadi faktor bapak/ibu untuk tidak memilih?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang menjadi persoalan masyarakat sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam pemilihan tetap (dpt) dalam pemilihan kepala desa mereka lebih memilih golput (golongan putih) / tidak memilih?
2. Dalam sistem pemilihan kepala desa yang telah dibuat secara serentak oleh bupati kabupaten kampar apakah masih kurang efektif? sehingga masih banyak terdapat kendala masyarakat untuk tidak memilih ?
3. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah berpartisipasi apakah murni dari hati nurani atau karena ada yang mencederai demokrasi seperti money politik sehingga masyarakat terpaksa untuk memilih ?
4. Faktor apa saja yang menjadi partisipasi bapak/ibu dalam pemilihan kepala desa ?
5. Bagaimana kinerja tim sukses dalam mempengaruhi masyarakat untuk bisa memberikan hak suara kepada calon kepala desa ?
6. Bagaimana sikap perangkat desa ,kepala dusun RT, dan RW apakah aparat pemerintahan desa ikut serta dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa memenangkan salah satu calon kepala desa?

Pemuda/ mahasiswa

1. Apa faktor saudara/i untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa?
2. bagaimana kontribusi pemuda dalam pemilihan kepala desa ?
3. Apa yang menjadi latar belakang pemuda atau mahasiswa untuk memilih calon kepala desa ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa yang dilakukan oleh tim sukses masing- masing calon kepala desa dalam mempengaruhi pemuda/ mahasiswa?

Calon kepala desa

1. Tahap apa saja yang harus diikuti sehingga bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa?
2. Apa yang menjadi motivasi bapak dalam mengikuti pemilihan kepala desa ?
3. Apa yang menjadi visi misi bapak dalam pemilihan kepala desa?
4. Apa rencana bapak kedepannya agar desa pulau gadang menjadi desa yang maju dan terbilang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat desa pulau gadang



Wawancara dengan salah satu calon kepala desa pulau gadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan kepala desa



Wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan kepala desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Amanah Panitia pemilihan kepala desa



UIN SUSKA RIAU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7381/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 5 Desember 2019 M
8 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
di Tempat

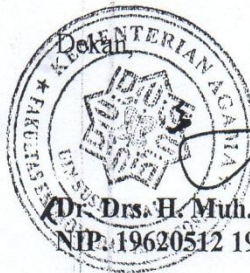
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sapitri
NIM. : 11675202720
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan
XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28819
TENTANG

032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7381/2019 Tanggal 5 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675202720 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | KAMPAR |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/12

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28819 tanggal 16 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SAFITRI |
| 2. NIM | : | 11675202720 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | KAMPAR |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU
GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2019 |
| 8. Lokasi | : | DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 7 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Pulau Gadang di XIII Koto Kampar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KEPALA DESA PULAU GADANG

Jl. Poros Pulau Gadang

Kode Pos : 28453

Website : <http://puga.wordpress.com>

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 140/SR/Pemdes-PG/2020/08

Kepala Desa Pulau Gadang setelah membaca Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/BKBP/2020/12 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan ini memberikan rekomendasi/Izin Penelitian kepada :

Nama : **SAFITRI**
NIM : 11675202720
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : KAMPAR
Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**
Lokasi Penelitian : DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 28 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KEPALA DESA PULAU GADANG
SYOFIAN SH, MH



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KEPALA DESA PULAU GADANG

Jl. Poros Pulau Gadang

Kode Pos : 28453

Website : <http://puga.wordpress.com>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/SK/Pemdes-PG/2020/11

Sekretaris Desa Pulau Gadang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SAFITRI**
NIM : 11675202720
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : KAMPAR
Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**
Lokasi Penelitian : DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR

Nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian dari tanggal 29 Januari 2020 – 04 Maret 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 05 Maret 2020

AN. KEPALA DESA PULAU GADANG

KEC. XIII KOTO KAMPAR



BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum wr.wb



Penulis bernama Safitri lahir di Pulau Luas, 09 Juli 1997. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara ayahanda bernama Abu Bakar dan ibunda bernama Sarlis. Penulis mempunyai saudara yang bernama Rauzi, Reno, Rosidi dan Siis Karmila yang selalu mendukung Penulis hingga menyelesaikan pendidikan S1.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, Tamat pendidikan Sekolah dasar pada SDM 031 Desa kemang Indah pada Tahun 2010. Tamat pendidikan pertama pada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah pada Tahun 2013. Tamat pendidikan Menengah Atas pada Pondok Pesantretren Mu'allimin Muhammadiyah Bangkinang kota Jl. Prof Moh Yamin SH pada Tahun 2016. Hingga menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Gadang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 08 juli hingga 31 Agustus 2019. Penulis melakukan penelitian pada pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan judul "***Anal isis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019***".

Berkat rahmat Allah SWT Pada tanggal 21 juli 2020 penulis telah melaksanakan sidang Munagasah (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau